

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta
- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta
- Bagir Manan. 2000. *Wewenang Privinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad: Bandung
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan: Jakarta
- Muhammad Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo: Jakarta
- Samidjo. 1997. *Ilmu Negara*. CV AMRICO: Bandung
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Zainal Asikin dan Aminuddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta
- Zainuddin Ali. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 *Tentang Izin Lingkungan*

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 *Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten Kota.*

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 *Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.*